

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali Chomzah. 2004. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Jakarta; Prestasi Pustakaraya.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Akur Nurasa Dian dan Aries Mujiburohman. 2020. *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah*, Yogyakarta; STPN Press.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Kencana.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta; Djambatan.
- Diana dan Hakim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Donna Okhtalia dan Toar Neman Palilingan. 2015. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Prosedur dan Permasalahannya*. Makassar; Cv. Wiguna Media.
- Endang Suhendar. 1996. *Tanah Sebagai Komoditi Strategis*. Jakarta; ELSAM.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Lexi Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abdul kadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana,

Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Depok: Glora Madani Press.

Salim H.S.. 2019. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Solahudin Pugung. 2021. *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT*. Yogyakarta; Deepublish.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sulhan, dkk., 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wajana Media.

Thoyib Sugiyanto. 2001. *Hukum Agraria*. Malang; Universitas Brawijaya.

Titik Triwulan T. 2016. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta; Kencana.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta; Kencana pranada Media Grup.

JURNAL, TESIS, DAN LAPORAN

Amoury Adi Sudiro, dkk. 2020. *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, Volume V Nomor 1.

Andi Mamminanga. 2008. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

- Ayi Vevi Resvina. 2024. *Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berkaitan dengan Alas Hak dan Keterangan Palsu*, Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) Vol 3 No 3
- Chintya Agnisya Putri, Gunarto. 2018. *Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah*. Jurnal Akta Vol. 5 No. 1. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Gusti Bagus Yoga Prawira. 2016. *Tanggungjawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Vol.4 No.1.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. *Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid*, Jurnal Crepido Volume 01 Nomor 01.
- Muhammad Ilham Arisaputra dan Sri Wildan Ainun Mardiah. 2019. *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi, Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Amanna Gappa, Vol. 27 No. 2.
- Muhammad Rafiq Utama. 2024. *Kewenangan Ppat Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*, Jurnal Grondwet Vol 3 No 2.
- Nadya Paramitha. 2023. *Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah di Kabupaten Agam*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Nicholas Alexandros, Amad Sudiro. 2023. *Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanagara. Jakarta. Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8, No. 6.
- Nurudin. 2016. *Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta oleh PPAT*, Brawijaya Law Student Journal published by Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Malang.

- Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat. 2023. *Akibat Hukum dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT*, Jurnal Buana Ilmu. Vol. 8 No. 1, Universitas Buana Perjuangan
- Rizwandi Adealmuqny. 2023. *Pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sunarti Sudirman. 2022. *Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Yovita Christian Assikin, dkk.. 2019. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 1. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1130

Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berita Negara: Tahun 2020 Nomor 84

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah